

ABSTRAK

Implementasi Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pontianak yang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana dengan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan UU SPPA Diversi mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan Diversi pada setiap tahap peradilan termasuk pemeriksaan di Pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk mengupayakan implementasi Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ketika sebelum melalui proses persidangan. Akan tetapi, berdasarkan data di Pengadilan Negeri Pontianak dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat 66 perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan untuk yang berhasil melalui implementasi Diversi hanya 8 perkara anak sedangkan 58 perkara anak yang berkonflik dengan hukum gagal melalui Diversi dan diselesaikan melalui proses persidangan secara formal.

Problematika yang dibahas pada penelitian ini mengenai implementasi Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pontianak dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi penghambat daam implementasi di Pengadilan Negeri Pontianak. Jenis penelitian menggunakan Yuridis Empiris melalui pendekatan yuridis empiriss sehingga penjelasan mengenai analisis berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang telah dilakukan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas, tujuan dan pelaksanaan sistem peradilan pidanaa anak tidak sepenuhnya dicapai dalam implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Pontianak. Terlihat dimana penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein pada implementasi Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pontianak, yang meliputi kualifikasi dari aparat penegak hukum, pihak – pihak yang dihadirkan, dan proses pelaksanaan.

Kata kunci : Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum, faktor hambatan

ABSTRAC

Implementation of mandatory Diversion of children in conflict with the law in the Pontianak District Court implemented under Law No. 11 of 2012 on juvenile criminal justice system. Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the judicial process to the process outside criminal justice with a restorative justice approach. Based on the SPPA law, the version has the purpose in achieving peace between victims and children, to complete cases of children outside the judicial process prevent children from being deprived of independence and encourage the community to participate and instill a sense of responsibility to children. Children in conflict with the law are required to be diverted at every stage of the trial including examination in court. The court is the last institution to seek the implementation of Diversion against children in conflict with the law when before going through the trial process. However, based on data in the Pontianak District Court in the last 5 (five) years from 2018 to 2022 there were 66 child cases that were in conflict with the law, and for those that were successful through the implementation of Diversion, only 8 child cases while 58 child cases that were in conflict with the law failed through Diversion and were resolved through formal proceedings.

The problematic implementation of these studies on the implementation of children in conflict with the laws of the pontify-children and analyzing factors - factors that challenge implementation in the pontial court. The type of research USES empirical juxies through the empiriss juridical approach that explains analysis based on the legal instruments that research has done.

The results of this study suggest that the principles, purposes and implementation of the pidanaa judicial system of children have not been fully attained in the implementation of the divorce at state court pontichildren. It shows where the writer finds some discrepancies between das sollen and das sein on the implementation of a version of the child in conflict with the law at the pontify-state court that includes qualifications from law enforcement officials, parties - those represented, and the process of implementation.

Keywords: Diversion, children in conflict with the law, obstacle faktors